



KANTOR REGIONAL XII

LAKIP 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dan dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja (LKj).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Kepegawaian negara, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Kepegawaian Negara sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Republik Indonesia yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi Badan Kepegawaian Negara, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawain Negara (BKN) ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014. Perubahan paradigma tersebut diwujudkan melalui manajemen pengembangan sumber daya manusia aparatur negara dengan harapan aparatur negara selalu terdepan dan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. Kanreg BKN mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

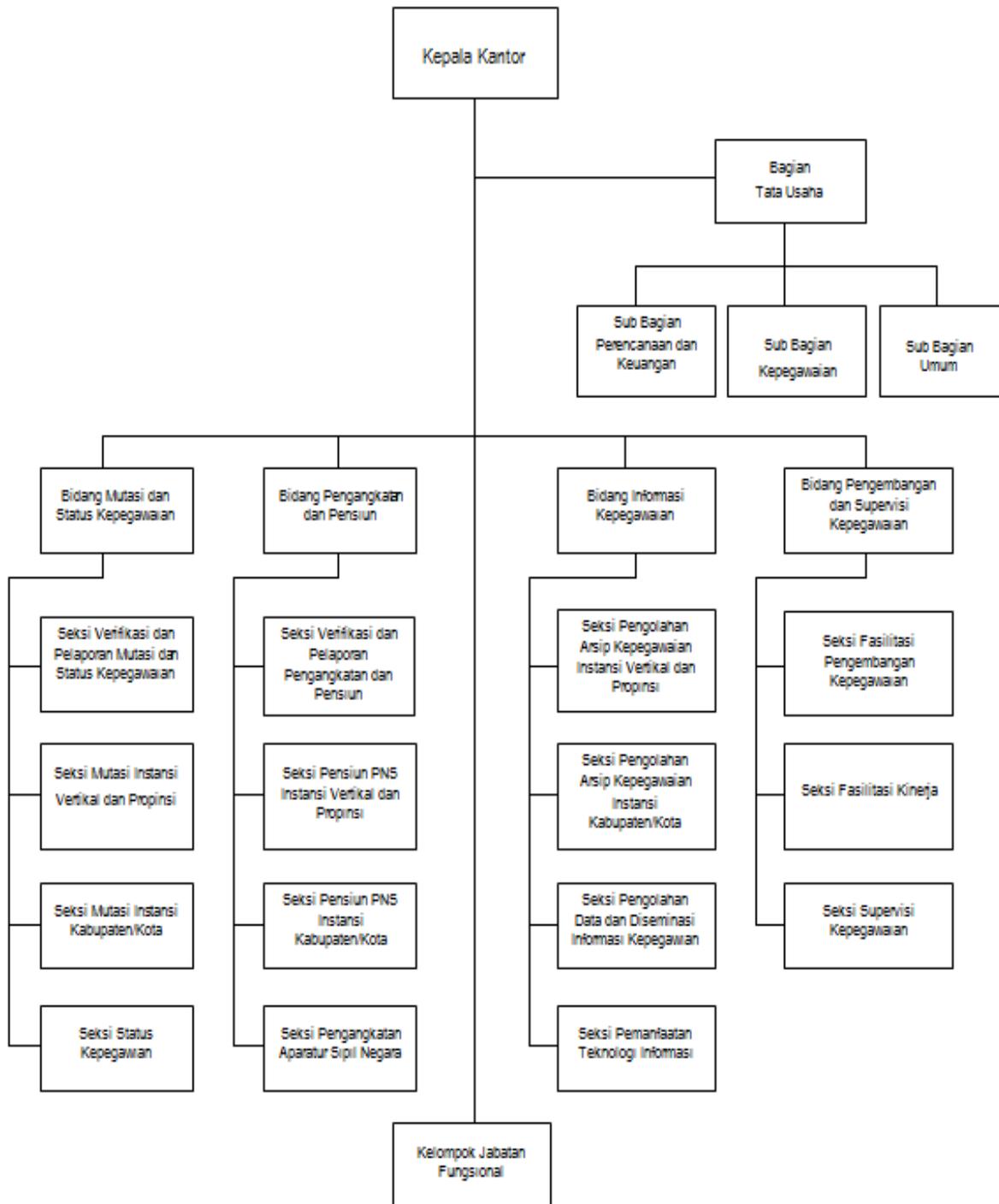
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Regional BKN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi, bimbingan, pemberian petunjuk teknis, dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- b. Pemberian pertimbangan dan/atau penetapan mutasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penetapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan penetapan status kepegawaian di wilayah kerjanya;
- d. Pemberian pertimbangan pensiun Pegawai Negeri Sipil instansi daerah dan penetapan status kepegawaian di wilayah kerjanya;
- e. Penyelenggaraan dan pemeliharaan jaringan informasi data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya;
- f. Penetapan mutasi Pegawai Negeri Sipil provinsi/kabupaten/kota ke instansi pusat atau ke instansi daerah;
- g. Pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi penilaian kinerja dan penyusunan standar kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya;
- h. Pengelolaan teknologi informasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara;

- j. Kantor Regional XII BKN Manado memiliki beban kerja sebanyak 225.796 PNS yang berada di 3 (tiga) provinsi, yaitu: Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Sumatera Barat.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, berikut adalah susunan organisasi Kantor Regional XII BKN :



Kantor Regional XII BKN berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara terdiri atas:

1. Kepala.

Kepala Kanreg BKN mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kanreg BKN Pekanbaru di wilayah kerjanya.

2. Bagian Tata Usaha.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan organisasi Kanreg BKN Pekanbaru.

3. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pemberian persetujuan kenaikan pangkat dan mutasi lainnya, serta pertimbangan teknis mutasi antar kabupaten/kota dalam provinsi, antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi, serta penyiapan pertimbangan status kepegawaian di wilayah kerja Kanreg BKN Pekanbaru.

4. Bidang Pengangkatan dan Pensiun.

Bidang Pengangkatan dan Pensiun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil penetapan kenaikan pangkat pengabdian dan anumerta, pemberhentian dan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang telah mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia, Janda/Duda bagi Pensiunan yang meninggal dunia serta pengelolaan tata naskah pensiun di wilayah kerja Kanreg BKN Pekanbaru.

5. Bidang Informasi Kepegawaian.

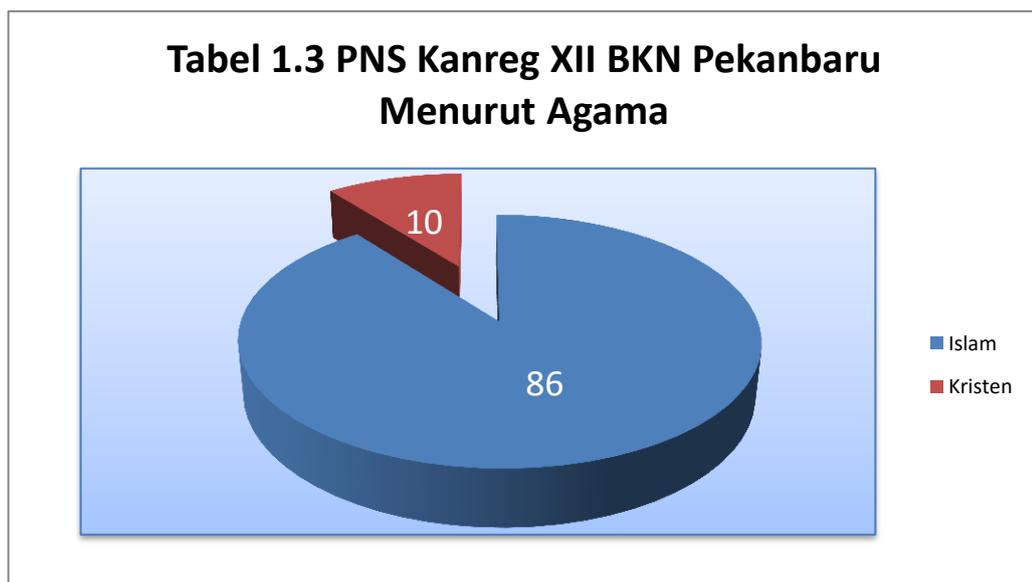
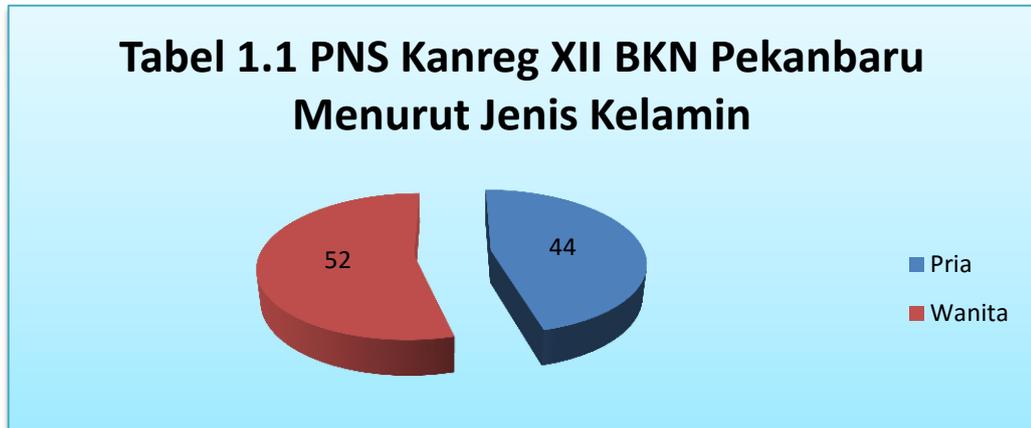
Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan sistem informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara pada instansi di wilayah kerja Kanreg BKN Pekanbaru.

6. Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian.

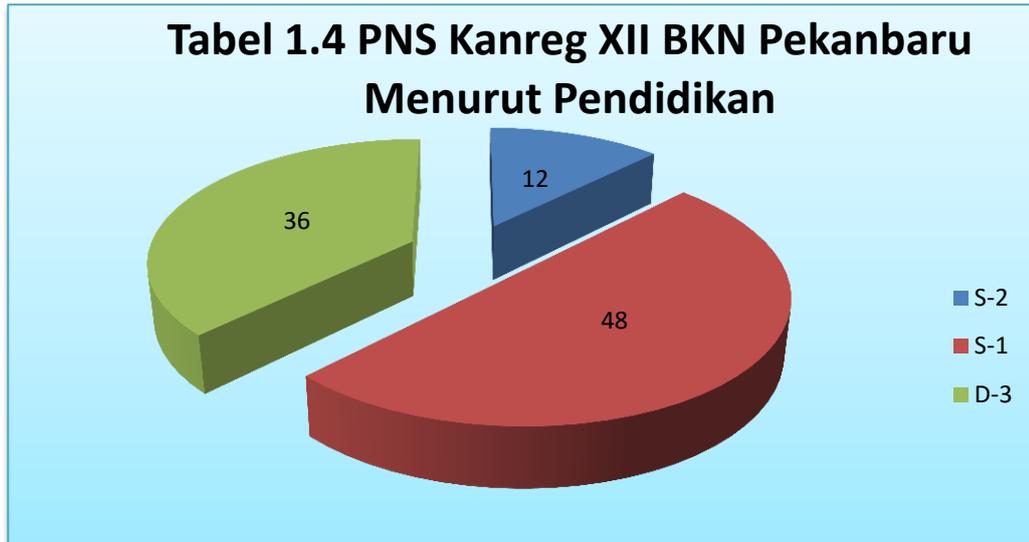
Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kepegawian dan supervisi pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara instansi di wilayah kerja Kanreg BKN Pekanbaru.

1.4 SUMBER DAYA

Sumber daya aparatur Kanreg XII BKN Pekanbaru berjumlah 96 (sembilan puluh enam) pegawai (kondisi 31 Desember 2018) dengan komposisi sebagai berikut :



**Tabel 1.4 PNS Kanreg XII BKN Pekanbaru
Menurut Pendidikan**



1.5 SARANA DAN PRASARANA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

Kanreg XII BKN yang berlokasi di Jl. Hangtuh Ujung No. 138 Pekanbaru selalu meningkatkan sarana dan prasarana setiap tahun untuk mendukung semua kegiatan melalui pengadaan dan renovasi. Kanreg XII BKN memiliki 7 (tujuh) unit mobil dinas yang terdiri dari 1 (satu) unit mobil Eselon II dan 6 (enam) unit mobil operasional, serta 3 (tiga) unit motor dinas, dengan rincian penempatan 6 Unit di kanreg dan 1 unit di Kantor UPT BKN Padang yang didukung oleh alat pengolahan data dan sarana pendukung lainnya .

1.6 Isu-Isu Strategis

Pembangunan nasional dilaksanakan sesuai Visi, Misi dan Program Aksi Presiden-Wakil Presiden, Jokowi-JK, yang telah dirumuskan dalam Sembilan Agenda Prioritas yang disebut dengan NAWACITA. Dalam NAWACITA, agenda kedua menyatakan pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Pemerintah secara konsisten akan menjalankan agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja

pelayanan publik, serta membuka ruang partisipasi publik melalui citizen charter.

Terkait dengan hal di atas, aspek sumber daya manusia aparatur menjadi isu strategis dalam kerangka kelembagaan pemerintahan, yang mencakup jumlah dan kualitas (yang meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*). Arah kebijakan dan strategi penguatan kerangka kelembagaan, yang berkaitan dengan aparatur negara adalah penyediaan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan Visi dan Misi Presiden dengan baik.

Secara kualitas, pembangunan sumber daya manusia aparatur sejalan dengan reformasi birokrasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan daya saing aparatur negara dalam mengimplementasikan program-program pemerintahan dan pembangunan nasional. Untuk menghasilkan sumber daya aparatur sipil negara yang unggul, dinamis, dan sesuai dengan tuntutan kondisi pembangunan, maka diperlukan perubahan paradigma manajemen kepegawaian yang sebelumnya lebih menekankan kepada hak dan kewajiban individual pegawai ke arah perspektif baru yang lebih menekankan kepada manajemen pengembangan sumber daya manusia yang strategis (*strategic human resource management*).

1.7 Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru Tahun 2018 adalah :

BAB : I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara dan Sistematika Penyusunan.

BAB : II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis setelah reviu, dan Perjanjian Kinerja

BAB : III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB : IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Perencanaan Strategis Sebelum dan Setelah Reviu

Rencana Strategis Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Badan Kepegawaian Negara dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Rencana Strategis Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru Nomor : 47a/KR.XI/SK/VIII/2018 tentang Reviu Rencana Strategis Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru Tahun 2015-2019. Penyusunan Reviu Renstra Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru telah melalui tahapan yang simultan dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Rapat Evaluasai Program dan Kegiatan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru , sehingga Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru yang merupakan dokumen perencanaan Eselon II Mandiri untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kantor Regional XII Badan

Kepegawaian Negara Pekanbaru dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

Visi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebelumnya adalah “Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian dan Pembinaan Manajemen Kepegawaian Yang Efektif di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru”.

Untuk menyelaraskan visi Badan Kepegawaian Negara maka visi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru diubah sebagai berikut : “Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025.”

2. Misi

Misi merupakan kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk mendukung tercapainya visi yang telah ditetapkan oleh instansi.

Misi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru yang tercantum di dalam Renstra Kantor Regional XII BKN Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan mutasi dan status kepegawaian, pengangkatan dan pensiun ;
- b. Meningkatkan kualitas data dan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian ;
- c. Meningkatkan kualitas data dan pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian ;
- d. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian ;
- e. Meningkatkan efektifitas penerapan sistem penilaian kinerja pegawai ;
- f. Mengembangkan kapabilitas SDM dan manajemen internal organisasi.

Berdasarkan pada hasil reviu, misi yang ditetapkan oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Tahun 2015-2019 belum disesuaikan dengan visi dan misi Badan Kepegawaian Negara yang telah diperbaharui. Kantor Regional sesungguhnya memiliki fungsi sebagai perwakilan Badan Kepegawaian Negara di daerah yang harus menjalankan keseluruhan misi yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Misi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru yang diselaraskan dengan misi Badan Kepegawaian Negara adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Kepegawaian;
2. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian;
3. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Peraturan Perundang-Undangan, Kinerja, dan Kesejahteraan Pegawai;
4. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
5. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Manajemen Internal BKN.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebelum di reviu adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian;
2. Terwujudnya Sistem Informasi Kepegawaian Yang Handal;
3. Terwujudnya Efektifitas Sistem Penilaian Kinerja, Supervisi dan Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Kepegawaian;

4. Terwujudnya Manajemen Internal Yang Efektif Dan Efisien.

Adapun Tujuan setelah di reviu adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kualitas Manajemen ASN;
2. Terwujudnya Kualitas ASN;
3. Terwujudnya pelayanan prima bidang Kepegawaian;
4. Terwujudnya Manajemen Internal yang akuntabel.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, Sasaran strategis yang hendak dicapai Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebelum di reviu adalah sebagai berikut :

- a. Menerapkan pusat pelayan terpadu (PPT) dalam pelayanan kepegawaian;
- b. Menerapkan sistem manajemen persuratan berbasis teknologi informasi;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan sistem rekrutmen berbasis CAT;
- d. Mengoptimalkan penggunaan SAPK dalam pelayanan mutasi kepegawaian;
- e. Melaksanakan rekonsiliasi dan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala;
- f. Melaksanakan penilaian kompetensi pegawai ASN melalui assesment center;
- g. Menyelenggarakan pembinaan kepegawaian melalui pemberian konsultasi, sosialisasi, bimbingan teknis, dan supervise;
- h. Menyelenggarakan layanan administrasi yang modern;
- i. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai standar.

Sasaran strategis Kantor Regional XII BKN Pekanbaru setelah di reviu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan ASN;
2. Keandalan sistem informasi ASN;

3. Meningkatkan disiplin pegawai ASN;
4. Meningkatkan profesionalisme ASN;
5. Terwujudnya pelayanan kepegawaian dengan berbasis manajemen mutu;
6. Meningkatnya pelayanan pembinaan PNS;
7. Terwujudnya BKN yang akuntabel dan tata kelola pemerintahan yang baik.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Sesuai dari hasil review tersebut di atas perlu ditetapkan Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kanreg XII BKN Pekanbaru

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan ASN.	<p>Persentase Instansi Pemerintah yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN Yang baik</p> <p>Instansi Pemerintah yang memanfaatkan Sistem Rekrutmen dan promosi dengan menggunakan alat bantu computer (CAT)</p> <p>Presentase instansi pemerintah yang telah melakukan pengelolaan kepegawaian yang baik</p>
2	Keandalan Sistem Informasi ASN	Presentase instansi pemerintah yang system informasi kepegawaiannya terintegrasi dengan SAPK BKN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
(1)	(2)	(3)
3	Meningkatnya disiplin Pegawai ASN	Persentase penurunan tingkat pelanggaran NSPK di Instansi pemerintah
4	Meningkatnya profesionalisme ASN	Index Profesional ASN Provinsi Kategori tinggi (81-90) Index Profesional ASN Kab/Kota Kategori tinggi (81-90)
5	Terwujudnya pelayanan kepegawaian dengan berbasis manajemen mutu	Index Kepuasan Instansi/PNS terhadap pelayanan kepegawaian
6	Meningkatnya pelayanan pembinaan PNS	Persentase Penurunan Jumlah Usulan Administratif Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Mutasi Lainnya, Pensiun) yang berkas tidak lengkap (BTL) dan tidak memenuhi syarat (TMS)
7	Terwujudnya BKN yang akuntabel dan tata kelola pemerintahan yang baik	Hasil Evaluasi terhadap Implementasi SAKIP di Kantor Regional BKN Indeks Kepuasan Publik Terhadap ketersediaan Layanan Informasi Kepegawaian

B. Penetapan Kinerja Kantor Regional XII BKN Tahun 2018

Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja ditetapkan untuk dijadikan sebagai tolok ukur pengukuran capaian kinerja. Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara menyusun penetapan kinerja tahun 2018 berdasarkan hasil pembahasan dengan seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara.

Tabel 1.2

Penetapan Kinerja Kantor Regional XII BKN Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan ASN.	Persentase Instansi Pemerintah yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN Yang baik	50%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase Instansi pemerintah yang memanfaatkan sistem rekrutmen dan promosi dengan menggunakan alat bantu komputer (CAT)	100%
		Presentase instansi pemerintah yang telah melakukan pengelolaan kepegawaian yang baik	100%
2	Keandalan Sistem Informasi ASN	Presentase instansi pemerintah yang sistem informasi kepegawaiannya terintegrasi dengan SAPK BKN	12,2%
3	Meningkatnya disiplin Pegawai ASN	Persentase penurunan tingkat pelanggaran NSPK di Instansi pemerintah	50%
4	Meningkatnya profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN Provinsi Kategori tinggi (81-90)	40
		Indeks Profesionalisme ASN Kab/Kota Kategori tinggi (81-90)	30
5	Terwujudnya pelayanan kepegawaian dengan berbasis manajemen mutu	Indeks Kepuasan Instansi/PNS terhadap pelayanan kepegawaian	80 (Baik)
6	Meningkatnya pelayanan pembinaan PNS	Persentase Penurunan Jumlah Usulan Administratif Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Mutasi Lainnya, Pensiun) yang berkas tidak lengkap (BTL) dan tidak memenuhi syarat (TMS)	40%
7	Terwujudnya BKN yang akuntabel dan tata kelola pemerintahan yang baik	Hasil Evaluasi terhadap Implementasi SAKIP di Kantor Regional BKN oleh Inspektorat	70 (Baik)
		Indeks Kepuasan Publik Terhadap ketersediaan Layanan Informasi Kepegawaian	80 (Baik)

Untuk mewujudkan target kinerja tersebut, Kanreg XII BKN mendapatkan anggaran dari APBN sebesar Rp. 19.611.135.000 (Sembilan belas miliar enam ratus sebelas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang terangkum dalam 3 program sebagai berikut :

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Penyelenggaraan Operasional dan Tugas Teknis Lainnya Kanreg I s.d XIV BKN	Rp. 10.613.872.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 3.072.450.000
3.	Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara	Rp. 5.924.813.000
Jumlah		Rp. 19.611.135.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kanreg XII BKN Tahun 2018

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Secara umum capaian kinerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru tahun 2018 dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya 104,03 % dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara di tahun 2018, maka diperoleh capaian kinerja sebagaimana pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan ASN.	Persentase Instansi Pemerintah yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN Yang baik	50%	51%	102%
		Persentase instansi pemerintah yang memanfaatkan sistem rekrutmen dan promosi dengan menggunakan alat bantu komputer CAT	100%	100%	100%
		Presentase instansi pemerintah yang telah melakukan	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pengelolaan kepegawaian yang baik			
2	Keandalan Sistem Informasi ASN	Instansi pemerintah yang sistem manajemen kepegawaiannya telah terintegrasi dengan SAPK BKN	12,2%	12,2%	100%
3	Meningkatnya disiplin Pegawai ASN	Persentase penurunan tingkat pelanggaran NSPK di Instansi pemerintah	50%	70%	140%
4	Meningkatnya profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN Provinsi kategori tinggi (81-90)	40%		
		Indeks Profesionalisme ASN Kab/Kota kategori tinggi (81-90)	30%		
5	Terwujudnya pelayanan kepegawaian dengan berbasis manajemen mutu	Index Kepuasan Instansi/PNS terhadap pelayanan kepegawaian	80 (Baik)	80,163 (Baik)	100,2%
6	Meningkatnya pelayanan pembinaan PNS	Persentase Penurunan Jumlah Usulan Administratif Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Mutasi Lainnya, Pensiun) yang berkas tidak	40%	42%	105%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		lengkap (BTL) dan tidak memenuhi syarat (TMS)			
7	Terwujudnya BKN yang akuntabel dan tata kelola pemerintahan yang baik	Hasil Evaluasi terhadap Implementasi SAKIP di Kantor Regional BKN oleh Inspektorat	70 (B) Baik	63,96 (B) Baik	91,37%
		Indeks Kepuasan Publik Terhadap ketersediaan Layanan Informasi Kepegawaian	80 (Baik)	78,192 (Baik)	97,74%

Sasaran I

Meningkatnya Kualitas pengelolaan ASN

Pada sasaran Strategis ini Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara ingin Mewujudkan Kualitas Manajemen ASN. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh pengelolaan PNS yang baik, yang meliputi : penyusunan, penetapan kebutuhan serta pengadaan PNS dan pengembangan PNS (mutasi, promosi, penilaian kinerja dan pola karir dengan indikator:

1.1 Persentase instansi pemerintah yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang baik

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan Instansi Pemerintah Daerah dalam melakukan Anjab dan ABK untuk menentukan perencanaan Kebutuhan pegawai tahun 2018. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru telah melakukan pendampingan pada 21 Instansi Pemerintah dalam menyusun ANJAB dan ABK, sehingga persentase Instansi Pemerintah yang sudah memiliki perencanaan

kebutuhan ASN yang baik di wilayah Kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru adalah sebesar 51%.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Instansi Pemerintah yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN Yang baik	50%	51%	102%

1.2 Persentase instansi pemerintah yang memanfaatkan sistem rekrutmen dan promosi dengan menggunakan alat bantu komputer (CAT)

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat Kepercayaan Instansi pemerintah terhadap sistem CAT untuk melakukan Proses Rekrutmen CPNS, Promosi maupun Mutasi PNS tahun 2018.

Pada tahun 2018 secara umum seluruh Instansi diwilayah kerja Kantor Regional XII BKN telah menggunakan CAT seperti pelaksanaan beberapa kegiatan yang memanfaatkan Fasilitas/Alat bantu komputer CAT yaitu: Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (Talentpool), Pelaksanaan Ujian Seleksi Ikatan Dinas, Pelaksanaan Pemetaan ASN Berbasis CAT, Pelaksanaan Tes Seleksi CPNS Kompetensi Dasar dan Kompetensi Bidang.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase instansi pemerintah yang memanfaatkan sistem rekrutmen dan promosi dengan menggunakan alat bantu komputer CAT	100%	100%	100%

1.3 Persentase instansi pemerintah yang telah melakukan pengelolaan kepegawaian yang baik

Sasaran II

Keandalan Sistem Informasi ASN

Pada sasaran strategis ini di wilayah Kerja Kanreg XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru menyelenggarakan Sistem informasi Manajemen kepegawaian ASN yang handal yaitu sistem informasi yang terintegrasi dan mampu berinteraksi dengan berbagai macam data yang diperoleh dari seluruh instansi daerah dengan indikator:

2.1. Persentase Instansi Pemerintah yang sistem informasi kepegawaiannya terintegrasi dengan SAPK BKN

Ini merupakan indikator baru setelah adanya review Renstra. Indikator ini bertujuan untuk meningkatkan pengintegrasian data PNS diwilayah kerja dengan SAPK BKN. Menurut hasil capaian terdapat 5 instansi yang telah melakukan integrasi dengan SAPK BKN, hasil capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Instansi pemerintah yang sistem manajemen kepegawaiannya telah terintegrasi dengan SAPK BKN	12 %	12%	100 %

Sasaran III

Meningkatkan Disiplin ASN

Pada sasaran strategis ini Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara mengembangkan dan mengoptimalkan Sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian ASN terhadap pelaksanaan Norma, standar dan prosedur dan kriteria manajemen ASN (NSPK) dalam melaksanakan pembinaan pengendalian dan pengawasan manajemen ASN dengan menetapkan indikator:

3.1 Persentase penurunan tingkat pelanggaran NSPK di Instansi pemerintah

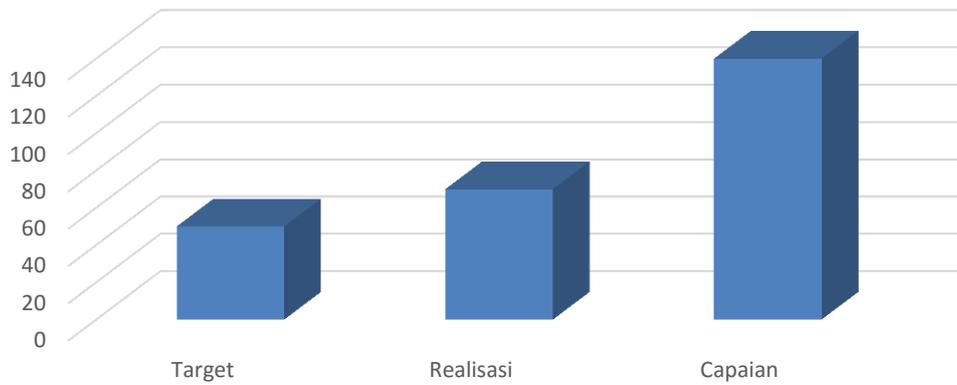
Selama tahun 2018 Persentase Instansi yang menaati NSPK bidang kepegawaian sesuai dengan target yang ditentukan yaitu 50%. Menurut data yang dihimpun Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kantor Regional XII BKN, masih ada masyarakat PNS yang belum menaati NSPK bidang kepegawaian, adapun pelanggaran peraturan bidang kepegawaian berkaitan dengan berikut ini :

1. Keberatan dan Banding Administratif;
2. Peninjauan kembali atas Keputusan Bupati;
3. Penjatuhan hukuman disiplin, dan;
4. Keberatan atas pemecatan.

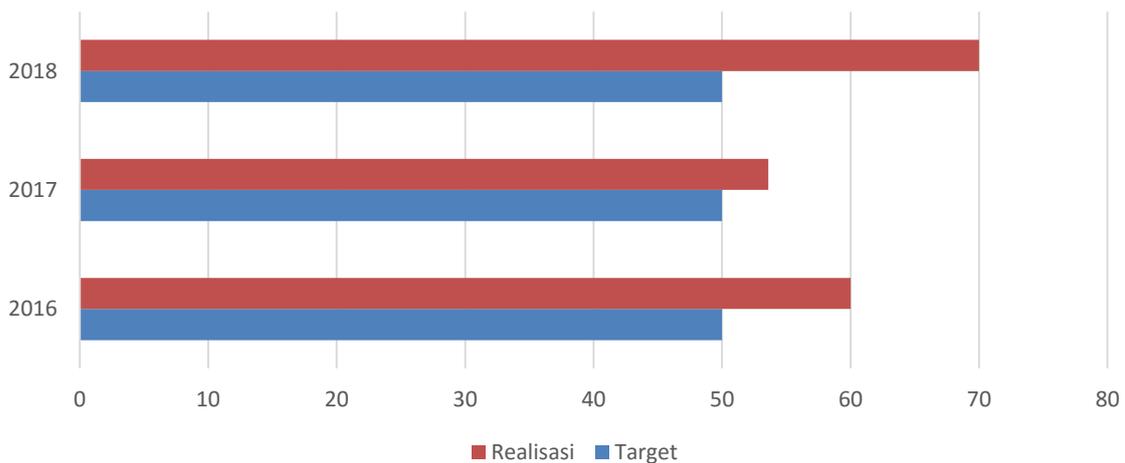
Berdasarkan hasil kinerja dari tahun 2018 terdapat penurunan tingkat pelanggaran terhadap peraturan kepegawaian dari tahun 2017. Hal ini disebabkan banyaknya PNS yang masih belum memahami dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat penurunannya seperti tabel yang terlampir dibawah ini :

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase penurunan tingkat pelanggaran NSPK di Instansi pemerintah	50%	70%	140%

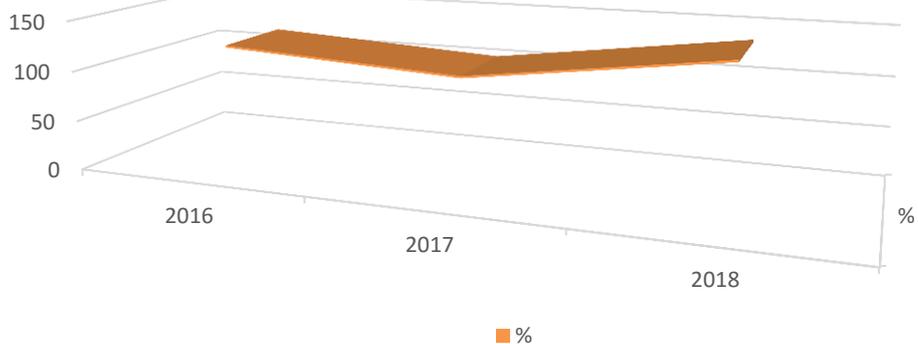
Grafik penurunan tingkat pelanggaran NSPK di Instansi Pemerintah Tahun 2018



Perbandingan Target dan Realisasi Penurunan tingkat pelanggaran NSPK di Instansi Pemerintah tahun 2016-2018



Perbandingan Trend Capaian Penurunan tingkat pelanggaran NSPK di Instansi Pemerintah tahun 2016-2018



Sasaran IV

Meningkatnya Profesionalisme ASN

Pada sasaran strategis ini Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru sebagaimana pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian memegang peran penting dalam perkembangan pemerintahan oleh sebab itu perlu tersedianya indikator yang lebih terukur, kredibel dan reliable. Adapun indikatornya sebagai berikut :

1. Indeks Profesionalisme ASN Provinsi.
2. Indeks Profesionalisme ASN Kabupaten/Kota

4.1 Indeks Profesionalisme ASN.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui dan mengontrol jumlah jabatan yang belum terisi menyesuaikan jabatan ASN yang kosong serta menyusun rencana pengembangan SDM di wilayah kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru tahun 2018, tercapai sebesar 75 dari target yang telah ditetapkan.

Dalam perealisasi target ini, tidak ditemukan kendala atau hambatan yang dihadapi. Namun demikian, evaluasi atas pelaksanaan menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam perealisasi target indikator kinerja ini. Tantangan ke depan adalah meyakinkan pemangku kepentingan untuk memperkuat pelibatan PNS dan masyarakat dalam Meningkatkan Profesionalisme ASN.

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
(1)	(3)	(4)	(5)
1	Index Profesional ASN Provinsi	30	0
2	Index Profesional ASN Kab/Kota	20	0

Sasaran V

Terwujudnya Pelayanan Kepegawaian dengan berbasis Manajemen mutu

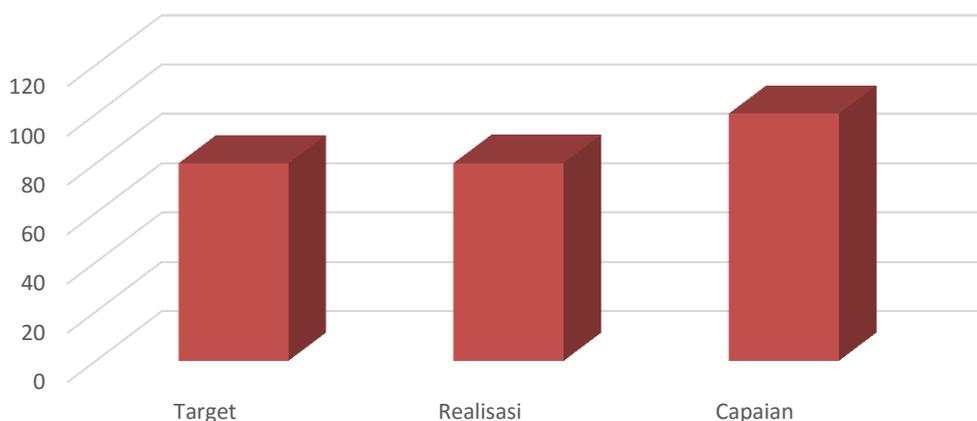
Pada sasaran strategis ini di wilayah kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru menyelenggarakan pelayanan kepegawaian ASN yang meliputi Penetapan CPNS, Kenaikan pangkat Mutasi dan Pensiun untuk mengukur keberhasilan dalam melaksanakan pelayanan kepegawaian dengan indikator:

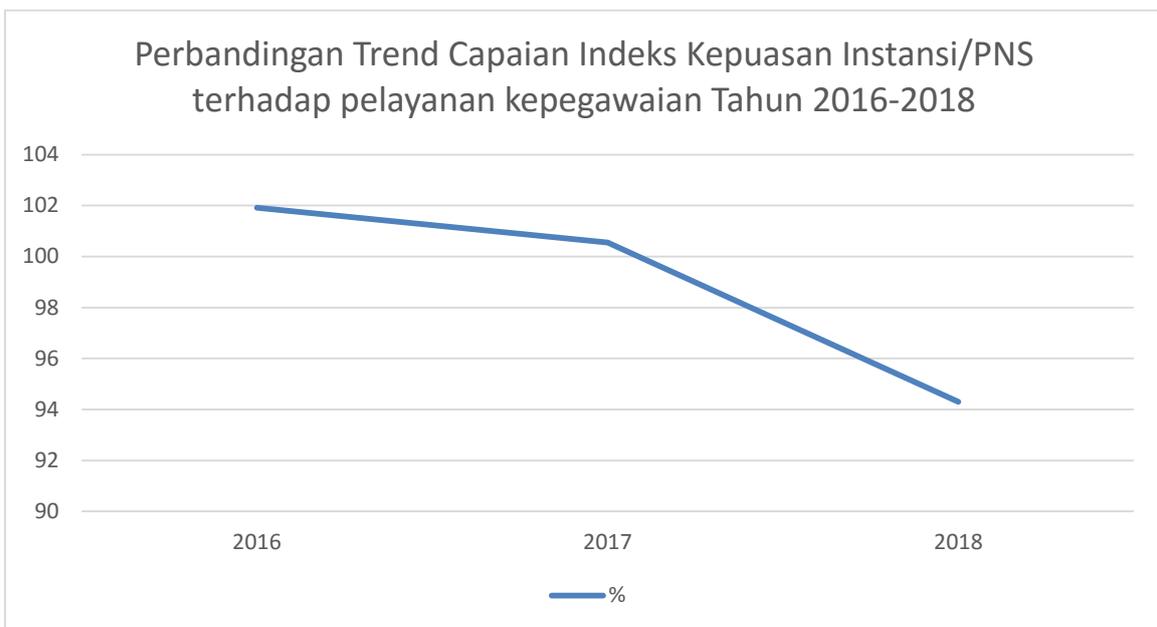
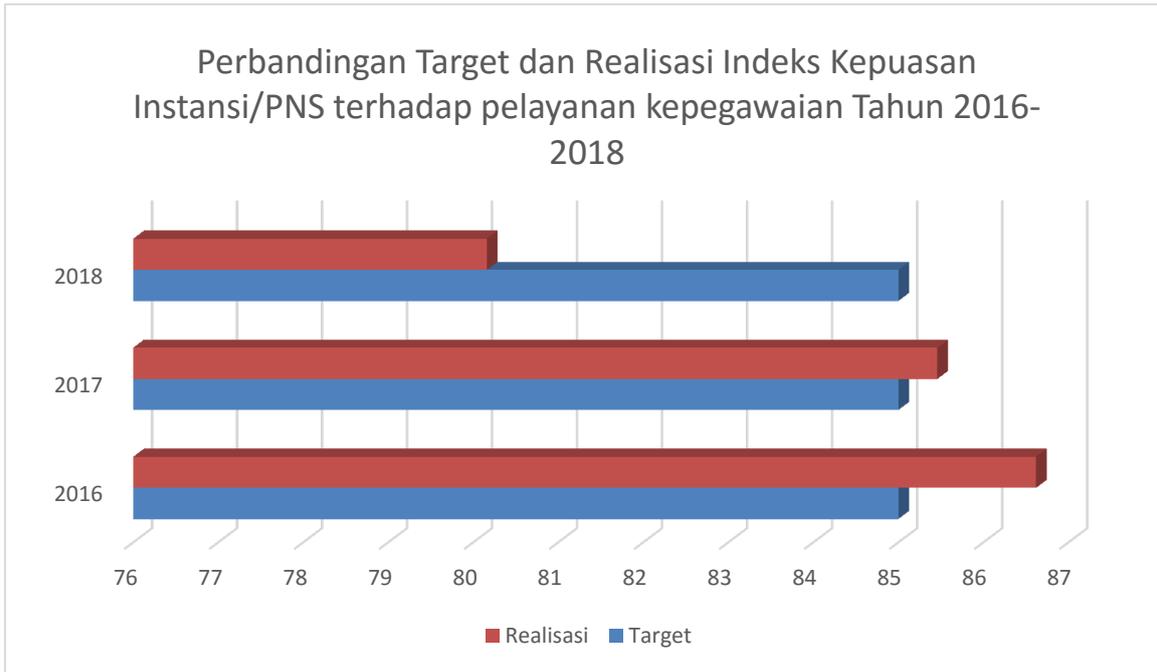
5.1 Indeks kepuasan instansi / PNS terhadap pelayanan kepegawaian.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat Kepuasan Instansi pemerintah terhadap sistem pelayanan Kepegawaian yang diberikan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru berkaitan dengan Penetapan NIP CPNS, Kenaikan Pangkat Mutasi dan Pensiun tahun 2018 yang tercapai 80,163 (Baik) dari target yang telah ditetapkan sebagaimana tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kepuasan instansi/PNS terhadap pelayanan kepegawaian.	80 (Baik)	80,163 (Baik)	100,2%

Grafik Indeks Kepuasan Instansi/PNS terhadap pelayanan kepegawaian Tahun 2018





Dari Grafik diatas terlihat bahwa terjadi penurunan capaian Indeks Kepuasan Instansi/PNS terhadap pelayanan kepegawaian pada tahun 2018. Setelah dilakukan analisa terhadap kuisisioner pengukuran IKM, penurunan ini antara lain disebabkan oleh Perubahan sistem penetapan pensiun PNS sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS, dimana sebelum 1 Mei 2018 Penetapan SK Pensiun PNS ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional BKN, namun

terhitung mulai tanggal 1 Mei 2018 kewenangan penetapan SK Pensiun berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi, Kantor Regional hanya mengeluarkan Pertimbangan Teknis (Pertek). Masyarakat selaku pengguna layanan pensiun masih banyak yang belum memahami terkait perubahan tersebut sehingga menimbulkan persepsi layanan yang kurang memuaskan bagi layanan pensiun di Kantor Regional XII BKN.

Sasaran VI

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan PNS

Pada sasaran strategis ini di wilayah kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru memiliki tugas dalam pelayanan pembinaan PNS di seluruh instansi daerah dan instansi vertikal yaitu dengan menyelenggarakan Fasilitasi Bimbingan Teknis Manajemen kepegawaian ASN di seluruh instansi daerah dengan indikator:

6.1 Persentase Penurunan Jumlah Usulan Adminitratif Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Mutasi Lainnya, Pensiun) yang berkas tidak lengkap (BTL) dan tidak memenuhi syarat (TMS)

Persentase Penurunan Jumlah Usulan Adminitratif Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Mutasi Lainnya, Pensiun) yang berkas tidak lengkap (BTL) dan tidak memenuhi syarat (TMS) pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 40%. Dari hasil realisasi dari unit pelayanan baik mutasi dan pensiun diperoleh nilai sebesar 42%.

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Penurunan Jumlah Usulan Adminitratif Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Mutasi Lainnya, Pensiun) yang berkas tidak lengkap (BTL) dan tidak memenuhi syarat (TMS)	40%	42%	105%

Sasaran VII

Terwujudnya BKN Yang Akuntabel dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Pada sasaran strategis ini di wilayah kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara menyelenggarakan Sistem tata kelola Manajemen kepegawaian Interlal yang akuntabel dan mampu menjadi motor penggerak Reformasi Birokrasi internal di wilayah kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara dan sebagai pembina manajemen ASN Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara mampu menjadi motor penggerak Reformasi Birokrasi seluruh instansi daerah dengan indikator:

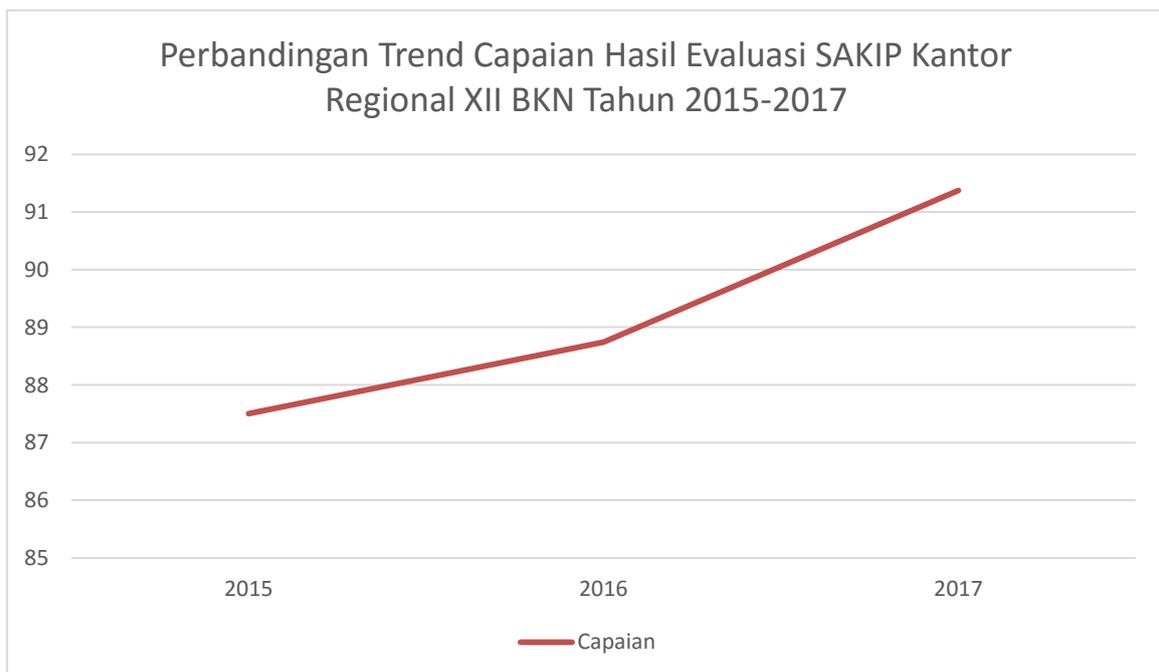
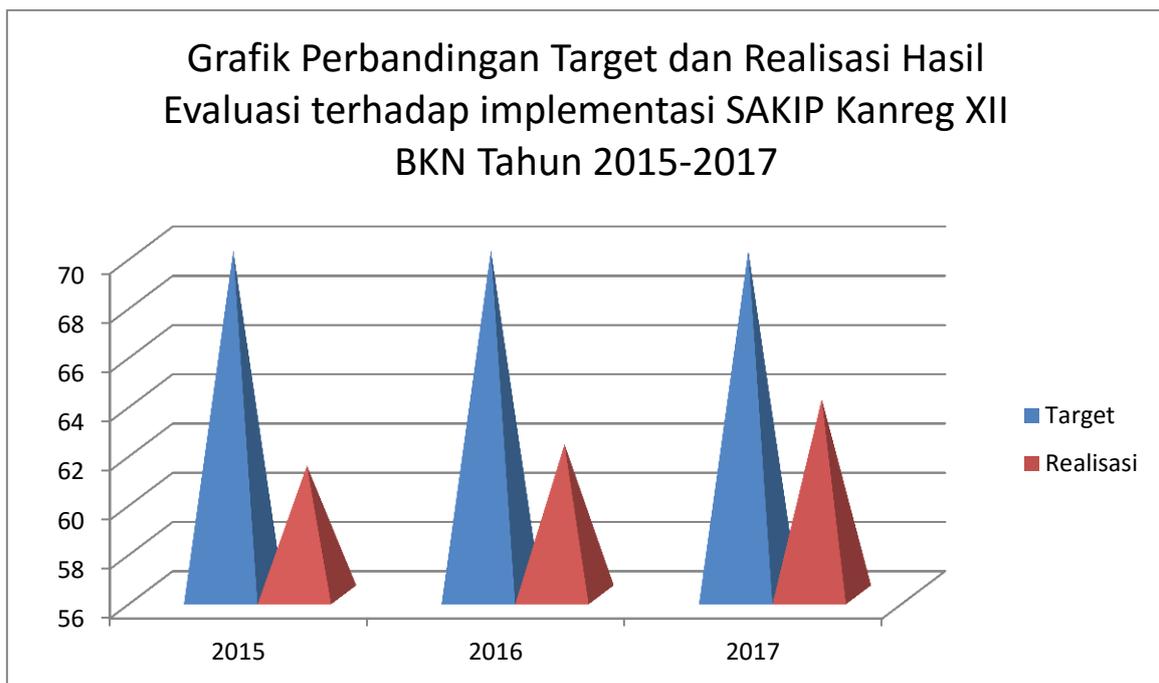
7.1 Hasil Evaluasi Terhadap Implementasi SAKIP BKN

Kanreg XII BKN menargetkan B (Baik) dari kisaran (nilai: >60-70) untuk penilaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kanreg XII BKN. Dari target yang ditetapkan, Pada tahun 2017 Kanreg XII BKN berhasil memperoleh nilai 63,96 (enam puluh tiga koma sembilan puluh enam) dengan kategori “B” (Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan). Untuk penerapan SAKIP tahun 2018 akan dilakukan penilaian ditahun 2019. Berikut perbandingan hasil Evaluasi Inspektorat terhadap SAKIP Kantor Regional XII BKN :

Kategori	Nilai Absolut	Interpretasi
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50 – 60	Cukup Baik
C	>30 – 50	Agak Kurang

D	>0 – 30	Kurang
---	---------	--------

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Hasil Evaluasi terhadap Implementasi SAKIP di Kantor Regional BKN	70 (B) Baik	63,96 (B) Baik	91,37%

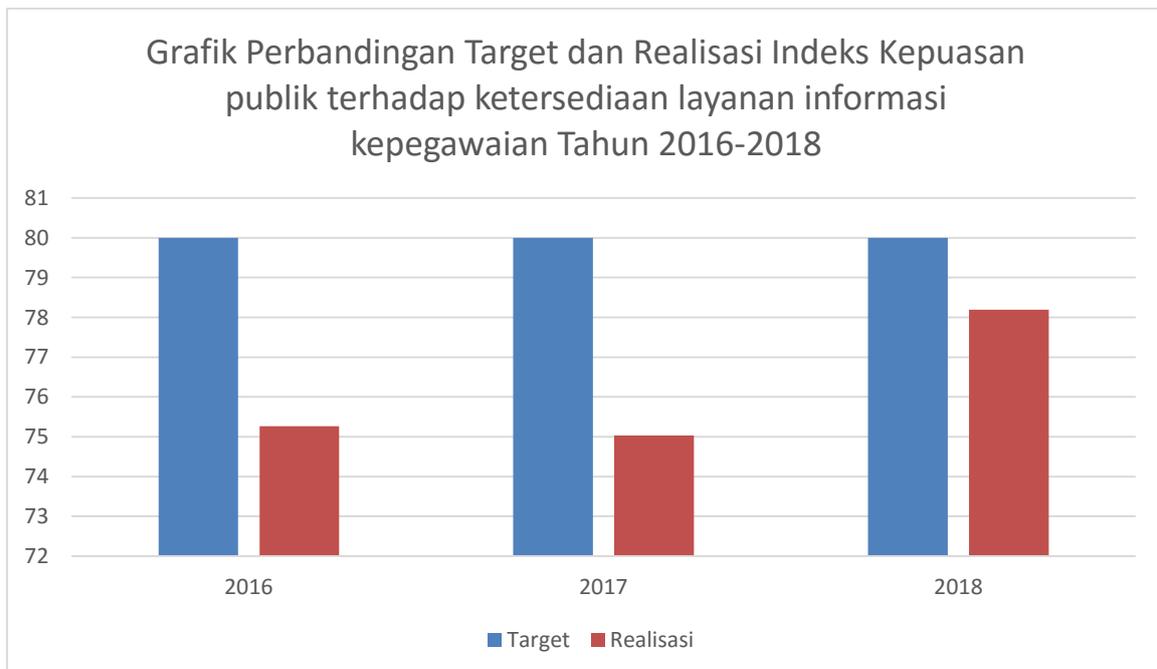


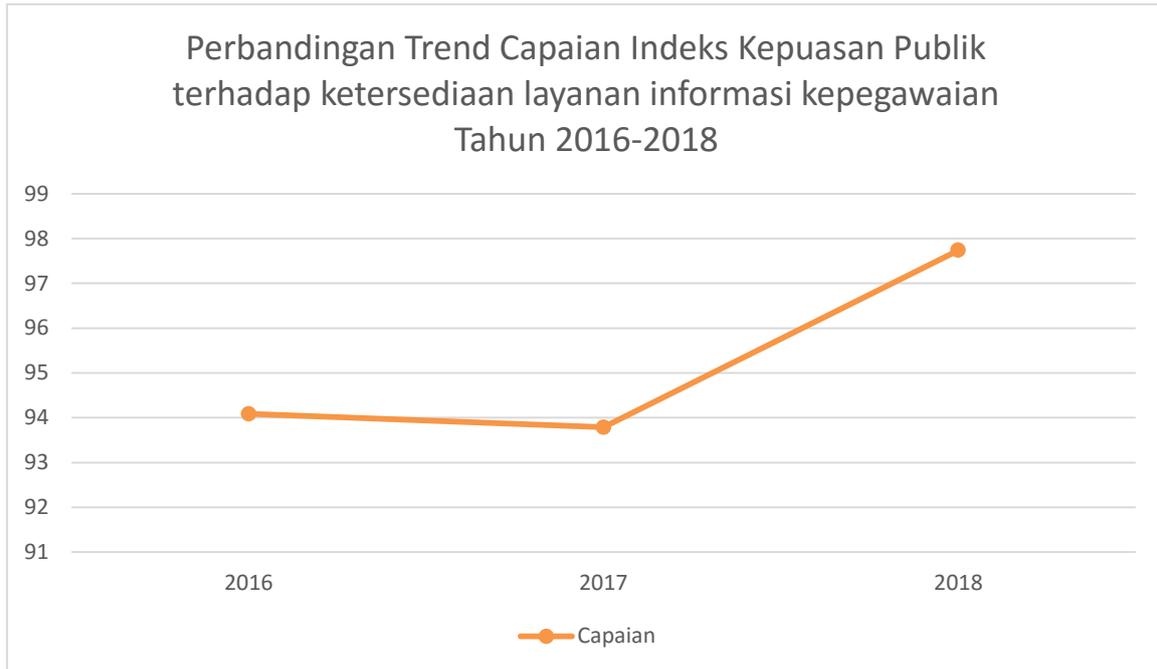
7.2 Indeks Publik terhadap ketersediaan layanan informasi kepegawaian

Kanreg XI BKN melakukan survei pada tahun 2018 terhadap pelayanan dengan 97 (Sembilan puluh tujuh) koresponden dengan nilai konversi sebesar 80 kategori mutu pelayanan “B” , mutu pelayanan Baik.

Dari hasil penelitian secara keseluruhan terhadap indeks kepuasan publik terhadap ketersediaan layanan informasi yang diberikan *supporting unit* Kantor Regional XII BKN Pekanbaru diperoleh predikat Baik dengan nilai IKM 78,192. Jika dibandingkan dengan tingkat kepuasan tahun sebelumnya maka tahun 2018 mengalami kenaikan dari 75,029 ke 78,192 sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal di Lingkungan Kantor Regional	80 (Baik)	78,192 (Baik)	97,74%





B. Realisasi Anggaran

1. Anggaran belanja Kantor Regional XII BKN merupakan bagian anggaran BKN, dan berdasarkan Surat Pengesahan Petikan DIPA Kantor Regional XII BKN Nomor SP DIPA-088.01.2.667901-2018 Tanggal 05 Desember 2017, Pagu Awal Anggaran TA 2018 adalah sebesar Rp. 14.652.672.000,-, Revisi ke 1 (satu) SP DIPA-088.01.2.667901/2018 Tanggal 20 April 2018 anggaran menjadi Rp. 16.052.672.000,-. Dan terakhir Revisi ke 9 (sembilan) DIPA Petikan Nomor SP DIPA-088.01.2.667901/2018 Tanggal 31 Desember 2018, Anggaran Kantor Regional XII BKN TA 2018 setelah revisi menjadi sebesar Rp. 19.613.310.000,-.

Adapun Anggaran tersebut untuk membiayai 3 (tiga) program RPJMN yang dilaksanakan Kantor Regional XII BKN, dengan rincian :

- a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN (01), sebesar Rp. 10.163.872.000,-. Anggaran pada program ini untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Belanja Pegawai (051) sebesar Rp. 5.620.872.000,-

- 2) Belanja Barang (052) sebesar Rp. 4.995.175.000,-
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN (02), sebesar Rp. 3.072.450.000,-. Anggaran pada program ini untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Kendaraan Bermotor (995) sebesar Rp. 210.000.000,-
 - 2) Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi (996) sebesar Rp. 72.500.000,-
 - 3) Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran (997) sebesar Rp. 78.500.000,-
 - 4) Pembangunan Gedung dan Bangunan (998) sebesar Rp. 2.711.450.000,-
- c) Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara (06), sebesar Rp. 5.924.813.000,-. Anggaran pada program ini untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Layanan Pelayanan CAT Kantor Regional sebesar Rp. 4.124.288.000,-
 - 2) Pelaksanaan Assesment Center Kantor Regional sebesar Rp. 30.000.000,-
 - 3) Penetapan NPKP, PMK dan Mutasi Lainnya sebesar Rp. 65.000.000,-
 - 4) Penetapan NIP CPNS sebesar Rp. 210.000.000,-
 - 5) Penetapan Karpeg, Karis/Karsu sebesar Rp. 26.000.000,-
 - 6) Penetapan SK Pensiun sebesar Rp. 155.000.000,-
 - 7) Penyelenggaraan sosialisasi/workshop/diseminasi/seminar/publikas sebesar Rp. 100.698.000,-
 - 8) Bimbingan teknis kepegawaian sebesar Rp. 1.045.575.000,-
 - 9) Pengelolaan tata naskah sebesar Rp. 268.950.000,-

Rincian Alokasi Anggaran Per Program (dalam rupiah)

No	Program	Jumlah
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN (01)	10.163.872.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN (02)	3.072.450.000
3	Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara (06)	5.924.813.000
Jumlah		19.611.135.000

Rincian Alokasi Anggaran Per Belanja (dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Pegawai (51)	5.620.872.000
2	Belanja Barang (52)	10.756.813.000
3	Belanja Modal (53)	3.233.450.000
Jumlah		19.611.135.000

2. Realisasi Anggaran Kantor Regional XII BKN TA 2018

Realisasi anggaran Kantor Regional XII BKN TA 2018 adalah sebesar Rp. 17.705.159.182,- atau sebesar 90,28% dari total anggaran, dengan rincian pada tabel berikut :

Realisasi Anggaran Per Program (dalam rupiah)

Ko de	Program	Anggaran				
		Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan	10.613.872.000	10.114.224.038	99,05	499.647.962	0,95

	Tugas Teknis Lainnya BKN					
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN	3.072.450.000	3.045.925.800	99,14	1.890.000	0,86
06	Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara	5.924.813.000	4.545.009.344	76,71	1.379.333.656	23,28
Jumlah		19.611.135.000	17.705.159.182	90,28	1.905.975.818	9,72

Realisasi Anggaran Per Belanja (dalam rupiah)

Ko de	Jenis Belanja	Anggaran				
		Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
51	Belanja Pegawai	5.620.872.000	5.470.274.374	97,32	150.597.626	2,68
52	Belanja Barang	10.756.813.000	9.031.649.008	83,96	1.725.163.992	16,04
53	Belanja Modal	3.233.450.000	3.203.235.800	99,07	30.214.200	0,93

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Regional XII BKN tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Kantor Regional XII BKN selama tahun 2018 yang diawali dengan penjabaran visi dan misi BKN, sasaran strategis dengan indikator kinerja utamanya dan realisasi capaian terhadap sasaran strategis dimaksud. Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, kerjasama, koordinasi, dan keaktifan baik itu dengan internal maupun dengan Stakeholders terkait.

Pencapaian kinerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru secara keseluruhan menunjukkan capaian berhasil terdapat 8 Indikator Kinerja berhasil mencapai target yang telah ditetapkan bahkan terdapat yang melebihi dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2018, Kantor Regional XII BKN menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan. Mengacu kepada 7 sasaran strategis dengan 10 indikator kinerja tersebut, secara umum telah berhasil dicapai karena capaiannya diatas 90%.

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Kantor Regional XII BKN diatas 104,03% yang berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran. Terhadap kegiatan yang belum mencapai target dilakukan evaluasi lebih lanjut dan akan dilakukan perbaikan di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja yang telah diraih oleh Kantor Regional XII BKN

Pekanbaru yang pada berbagai sasaran strategis dan indikator kinerja utama Kantor Regional XII BKN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hasil ini dari evaluasi pencapaian kinerja dalam laporan ini merupakan bahan pembelajaran yang baik bagi Kantor Regional XII untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Untuk itu kedepan, dengan memperhatikan evaluasi tersebut Kanreg XII BKN akan mengupayakan langkah-langkah perbaikan secara konkrit dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.